

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran krusial dalam membangun kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dibentuk untuk menjadi pemimpin masa depan yang cerdas, berintegritas, dan bertanggung jawab. Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih memiliki pekerjaan besar, yaitu mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter serta sikap yang luhur. Pemerintah telah melaksanakan penguatan pendidikan karakter, khususnya dalam proses pembelajaran. Langkah ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Republik Indonesia, 2003, Pasal 3). Selain itu, pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Kurniawati & Mawardi, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik adalah Pendidikan Pancasila. Dalam kurikulum sekolah dasar, Pendidikan Pancasila menjadi pondasi penting bagi pembentukan sikap dan nilai moral peserta didik. Pada usia 6-12 tahun, anak berada dalam fase perkembangan kognitif dan emosional yang menentukan, di mana internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan empati dapat membentuk identitas moral mereka (Lickona, 2004). Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis karena tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik etika sehari-hari. Misalnya, melalui studi

kasus tentang keadilan sosial atau simulasi musyawarah, peserta didik belajar menerapkan nilai-nilai moral dalam konteks nyata. Selain itu, integrasi pendidikan karakter dalam Pendidikan Pancasila membantu mengurangi resiko degradasi moral, seperti *bullying* dan intoleransi, serta mempersiapkan generasi yang mampu berkolaborasi dan berpikir kritis di era global (Berkowitz & Bier, 2007). Dengan demikian, Pendidikan Pancasila memiliki peran yang signifikan dalam membangun karakter peserta didik di lingkungan sekolah (Kurniawati & Mawardi, 2021). Melalui Pendidikan Pancasila, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat serta bangsa.

Penilaian sikap merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas (Utami dkk., 2022). Penilaian ini tidak hanya membantu guru dalam memantau perkembangan karakter peserta didik, tetapi juga berperan dalam membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Kurniawati & Mawardi (2021) menyatakan bahwa penilaian sikap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk melihat perkembangan psikologis dan karakter peserta didik secara utuh. Namun, penilaian ini sering dianggap sulit karena tidak bisa dilihat hanya dari satu pertemuan, sehingga diperlukan observasi berkelanjutan agar hasilnya akurat (Ulfa, 2019). Aspek yang dinilai mencakup sikap terhadap mata pelajaran, guru, materi, dan hubungan sosial seperti kerja sama, kekeluargaan, serta interaksi dengan orang lain (Hari Setiadi dalam Ulfa, 2019).

Guru memiliki peran penting sebagai penilai dalam proses pendidikan. Sebagai komponen utama dalam pembelajaran, kemampuan guru dalam melakukan penilaian yang objektif dan autentik sangat memengaruhi hasil belajar dan pembentukan karakter peserta didik. Tanpa penilaian yang adil dan konsisten, proses pendidikan tidak dapat mencapai hasil yang optimal (Bhughe, 2022). Selain sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai penilai yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi sikap, nilai, dan etika peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan penilaian yang objektif, berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, untuk menghindari

subjektivitas. Dengan melakukan penilaian sikap yang adil dan berdasarkan bukti nyata, guru dapat mendukung perkembangan kepribadian dan karakter peserta didik secara efektif (Suprahatiningrum, 2017). Di sisi lain, guru memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan penilaian sikap yang konsisten dan autentik, agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, peran guru sebagai penilai yang objektif dan profesional sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan bagi setiap warga negara (Latifah dalam Nuriana, 2018).

Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi di lapangan, banyak guru mengalami kesulitan dalam menerapkan penilaian sikap secara objektif dan autentik. Kesulitan ini terjadi karena penilaian sikap memerlukan observasi yang cermat dan konsistensi dalam evaluasi, yang sering kali sulit dilakukan secara akurat. Sementara itu, penilaian autentik mencakup tiga ranah utama yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan (Suryani, 2016). Namun, dalam pelaksanaannya, penilaian sikap memerlukan observasi yang cermat dan konsistensi dalam evaluasi, yang sering kali menjadi tantangan bagi guru. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan standar yang tepat untuk menilai sikap peserta didik secara adil dan akurat. Salah satu penyebab kesulitan ini adalah adaptasi guru terhadap kurikulum baru yang membutuhkan penyesuaian dalam metode dan pendekatan penilaian (Oditya dkk., 2024). Kesulitan lain yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian adalah kurangnya fleksibilitas dalam menggunakan instrumen penilaian. Contohnya, guru cenderung terpaku pada penggunaan lembar observasi untuk menilai sikap semua peserta didik (Sani, 2022). Selain itu, Ramadhani & Ramadan (2022) mengemukakan bahwa implementasi penilaian sikap seringkali tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Guru juga kerap kali tidak menggunakan instrumen penilaian yang terstandar dan lebih mengandalkan observasi langsung. Akibatnya, penilaian menjadi lebih subjektif dan kurang terukur. Persepsi pribadi guru turut memengaruhi hasil penilaian, sehingga menimbulkan inkonsistensi dan perbedaan penilaian antar peserta didik (Suryani, 2016). Kesulitan-kesulitan ini menunjukkan bahwa banyak guru mengalami hambatan dalam melakukan penilaian sikap secara objektif dan autentik saat observasi langsung di lapangan.

Permasalahan dalam penerapan penilaian sikap di sekolah bisa berdampak pada pengalaman, persepsi, dan praktik guru yang beragam. Banyak guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan penilaian secara objektif dan autentik, sehingga berdampak pada persepsi subjektif dan inkonsistensi hasil penilaian. Selain itu, kendala teknis, pedagogis, dan administratif menjadi hambatan yang signifikan, seperti kurangnya instrumen penilaian yang terstandar dan kesulitan dalam menyesuaikan metode penilaian dengan kurikulum baru. Akibatnya, guru sering kali menghadapi kebingungan dalam menentukan kriteria penilaian yang tepat, sehingga mengurangi keakuratan dan keadilan dalam mengevaluasi sikap peserta didik. Meskipun demikian, beberapa guru berusaha mencari strategi atau solusi untuk mengatasi kendala tersebut, seperti mengembangkan instrumen penilaian yang lebih jelas dan terukur serta melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyamakan persepsi penilaian. Namun, tanpa adanya dukungan pelatihan dan kebijakan yang memadai, implementasi penilaian sikap secara konsisten dan efektif tetap menjadi tantangan besar dalam proses pendidikan karakter.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain dilakukan oleh Noviyani (2017) yang meneliti kompetensi pedagogik guru dalam melakukan penilaian sikap spiritual dan sosial pada mata pelajaran PPKn di tingkat SMK. Penelitian ini berfokus pada kompetensi pedagogik guru dalam konteks pendidikan menengah, yang berbeda dengan penelitian ini yang dilakukan di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, Damaryanti dkk., (2023) membahas implementasi penilaian autentik dalam Kurikulum 2013 di sekolah dasar, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, namun tidak secara khusus menyoroti pengalaman guru dalam menilai sikap dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam literatur terkait eksplorasi pengalaman guru dalam melakukan penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada teori atau implementasi teknis, tanpa menggali secara mendalam pengalaman dan persepsi guru. Untuk itu, pendekatan fenomenologis dipilih dalam penelitian ini guna memahami bagaimana guru mengalami dan menginterpretasikan proses penilaian sikap dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi baru (*novelty*) dalam kajian penilaian sikap, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar, dengan menyajikan wawasan yang lebih kaya mengenai makna dan kompleksitas penilaian sikap dari sudut pandang guru. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian berjudul *Eksplorasi Pengalaman Guru dalam Melaksanakan Penilaian Sikap pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila: Studi Fenomenologis di Sekolah Dasar*.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Belum terungkap secara mendalam pengalaman guru dalam melaksanakan penilaian sikap, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar, sehingga diperlukan eksplorasi mengenai praktik, persepsi, dan pendekatan yang digunakan oleh guru dalam penilaian sikap.
- 1.2.2 Guru menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan penilaian sikap, baik dari aspek teknis, pedagogis, maupun administratif, namun strategi atau solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut belum banyak diteliti, sehingga belum ada panduan yang komprehensif untuk membantu guru melaksanakan penilaian sikap secara efektif dan objektif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan suatu permasalahan, yaitu:

- 1.3.1 Bagaimana pengalaman guru dalam melaksanakan penilaian sikap?
- 1.3.2 Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam penilaian sikap?
- 1.3.3 Bagaimana upaya guru mengatasi kendala dalam penilaian sikap?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan harapan atau sasaran yang akan dicapai dari kegiatan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang diharapkan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan umum dari dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengalaman guru dalam melaksanakan penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah.

- 1) Untuk mengetahui pengalaman guru dalam melaksanakan penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Pancasila.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Pancasila.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Pancasila.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai pengalaman guru dalam melaksanakan penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi para pembaca dan pihak terkait mengenai kendala dan upaya yang dihadapi guru dalam penilaian sikap.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik penelitian mengenai penilaian sikap dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar.

1.5.2 Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait pengalaman, kendala, dan upaya yang dilakukan guru dalam melaksanakan penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Pancasila.
- 2) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dan refleksi dalam melaksanakan penilaian sikap secara lebih efektif dan efisien.
- 3) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan strategi penilaian sikap yang lebih baik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila.
- 4) Bagi pembuat kebijakan pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup eksplorasi pengalaman guru dalam melaksanakan penilaian sikap pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Fokus penelitian ini meliputi:

- 1) Subjek Penelitian: Guru sekolah dasar yang mengajar Pendidikan Pancasila dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan penilaian sikap peserta didik.
- 2) Konteks Penelitian: Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar yang menerapkan kurikulum yang mencakup pendidikan karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila.
- 3) Aspek yang Diteliti:
 - a. Metode yang digunakan guru dalam menilai sikap peserta didik.
 - b. Kendala yang dihadapi guru dalam penilaian sikap.
 - c. Strategi yang diterapkan guru untuk mengatasi kendala tersebut.
 - d. Persepsi guru terhadap efektivitas penilaian sikap dalam membentuk karakter peserta didik.

- 4) Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman guru secara mendalam.

Dengan ruang lingkup diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai implementasi penilaian sikap dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya.